

PERMINTAAN RUMAH TANGGA KOTA DI INDONESIA TERHADAP KEANEKARAGAMAN PANGAN

Agus Pakpahan dan Sri Hastuti Suhartini¹⁾

Abstract

There are numerous analyses of demand for food have been conducted in Indonesia. However, there is still lack of attention on demand for food diversity in Indonesia. The main purpose of this paper is to seek knowledge about the development of food diversity and its relationship with urban household expenditure in Indonesia. The analysis showed that food consumption pattern of urban household tended to be more diversified and household income played an important role in increasing demand for food diversity.

Abstrak

Analisis permintaan terhadap pangan di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi aspek permintaan terhadap keanekaragaman pangan belum banyak diteliti. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan permintaan keanekaragaman rumah tangga kota di Indonesia terhadap pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permintaan terhadap keanekaragaman masyarakat kota cenderung meningkat dan pendapatan merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan permintaan terhadap keanekaragaman pangan.

PENDAHULUAN

Analisis permintaan terhadap pangan sampai saat ini masih merupakan aktivitas penting dalam khasanah penelitian ekonomi pangan di Indonesia. Sebagai contoh, proyek kerjasama antara Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan Center for Agricultural and Rural Development (CARD) Iowa State University telah memusatkan perhatiannya untuk melakukan analisis permintaan terhadap pangan. Disamping itu, masih banyak penelitian-penelitian lain yang telah mencoba menganalisis permintaan terhadap pangan. Akan tetapi, masih ada satu dimensi permintaan terhadap pangan yang belum banyak dilihat walaupun telah ada upaya Pemerintah melalui Inpres No. 14/1974 dan diperbaharui dengan Inpres No. 20/1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat. Dimensi tersebut adalah permintaan terhadap keanekaragaman pangan.

Keanekaragaman pangan merupakan komoditas majemuk. Dalam konteks Indonesia keanekaragaman konsumsi pangan sering diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non-beras. Pengetahuan tentang permintaan terhadap keanekaragaman yang direflek-

1) Staf Peneliti Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

sikan oleh perkembangan keanekaragaman konsumsi merupakan hal yang penting berdasarkan beberapa alasan berikut. **Pertama**, dalam lingkup kepentingan nasional pengurangan konsumsi beras akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian swasembada beras atau keamanan pangan. **Kedua**, diversifikasi konsumsi akan merubah alokasi sumberdaya kearah yang lebih efisien, fleksibel, dan stabil. **Ketiga**, keanekaragaman pangan juga penting dilihat dari segi nutrisi (Shonkwiler *et. al.*, 1987). **Keempat**, pengetahuan tentang keanekaragaman pangan juga akan berguna untuk digunakan dalam perumusan strategi pengembangan sistem pangan. Oleh karena itu, selain pengetahuan tentang permintaan terhadap masing-masing komoditas pangan, pengetahuan tentang permintaan terhadap keanekaragaman pangan juga merupakan informasi penting.

Tulisan ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan keanekaragaman konsumsi pangan di Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini secara khusus mengkaji hubungan antara keanekaragaman konsumsi pangan dengan pendapatan rumah tangga.

KERANGKA PEMIKIRAN

Keanekaragaman Konsumsi Pangan dalam Konteks Model Alokasi

Nilai maksimum dari konsumsi sebuah rumah tangga adalah sama dengan total pengeluaran rumah tangga termasuk untuk menabung. Karena tabungan menyangkut alokasi inter-temporal maka dalam analisis permintaan statik, tabungan biasanya dikeluarkan dari lingkup analisis. Selanjutnya, walaupun penawaran tenaga kerja juga terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa, untuk memudahkan analisis, penawaran tenaga kerja juga biasanya diasumsikan terpisah dari permintaan terhadap barang dan jasa. Lebih jauh lagi, anggaran biasanya dialokasikan berdasarkan asumsi bahwa komoditas pangan adalah terpisah dari komoditas non-pangan. Asumsi ini mengandung arti bahwa interaksi antara komoditas pangan dengan non-pangan hanya terjadi melalui pendapatan. Dengan kata lain perubahan harga komoditas non-pangan berdasarkan asumsi diatas, tidak memberikan efek terhadap perubahan permintaan komoditas pangan. Asumsi ini selain menyederhanakan permasalahan juga cukup realistik apabila kita membicarakan komoditas agregat seperti halnya pangan.

Andaikan M adalah total pengeluaran pangan. Selanjutnya, andaikan pula q_i menunjukkan jenis komoditas i , $i = 1, 2, \dots, n$, yang termasuk dalam gugus pilihan konsumen, dan p_i adalah harga dari masing-masing komoditas tersebut. Dengan demikian, kita memperoleh hubungan:

$$M = \sum_{i=1}^n p_i q_i \dots\dots\dots (1)$$

Dari persamaan (1) kita dapat mendefinisikan proporsi M yang dibelanjakan untuk masing-masing q_i , yaitu:

$$w_i = \frac{p_i q_i}{M} \dots\dots\dots (2a)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1.0 \dots\dots\dots (2b)$$

dimana w_i adalah proporsi total pengeluaran pangan yang dibelanjakan untuk komoditas q_i .

Menggunakan w_i sebagai ukuran alokasi memiliki beberapa keuntungan. **Pertama**, w_i ($i = 1, 2, \dots, n$) dapat diperbandingkan langsung karena ia bebas dari satuan. **Kedua**, w_i memiliki nilai batas yang jelas yang sangat berguna untuk menguji (ceking) data. Sebagai contoh nilai terendah dari w_i adalah 0.00 dan nilai tertinggi adalah 1.00. Hal ini merefleksikan alokasi dari sejumlah sumberdaya yang berjumlah tetap selama periode analisis, dalam hal ini adalah total anggaran rumah tangga.

Ukuran pemusatan atau penyebaran alokasi pengeluaran akan sensitif terhadap pendefinisian komoditas atau tingkat agregasi yang kita buat. Semakin rendah tingkat agregasi, semakin beranekaragam jenis pengeluaran. Sebaliknya, apabila tingkat agregasi terlalu umum, kita semakin tidak dapat melihat penyebaran anggaran. Misalnya, apabila kita mengagregasikan beras, susu, telur, sayur dan seterusnya maka kita akan kehilangan informasi mengenai komponen komoditas dalam komoditas agregat tersebut. Dipihak lain, dengan melakukan agregasi, kita memperoleh manfaat berupa penyederhanaan informasi tentang struktur komoditas pangan. Tingkat agregasi mana yang sebaiknya digunakan ditentukan oleh tiga hal. **Pertama**, permasalahan yang diteliti, **kedua**, tujuan analisis, dan **ketiga**, ketersediaan data.

METODA ANALISIS

Klasifikasi Pangan

Dalam penelitian ini pangan kita kelompokkan kedalam dua belas jenis komoditas: (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) ikan, (4) daging, (5) telur dan susu, (6) sayuran, (7) kacang-kacangan, (8) buah-buahan, (9) konsumsi lainnya, (10) makanan jadi, (11) minuman beralkohol, dan (12) tembakau dan sirih. Klasifikasi ini dinilai sesuai dengan tujuan untuk melihat kecenderungan keanekaragaman menu pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, kla-

sifikasi diatas sesuai dengan klasifikasi yang dibuat oleh BPS sehingga data yang dibutuhkan telah sesuai dengan format BPS.

Ukuran keanekaragaman didasarkan atas pola alokasi anggaran rumah tangga. Ukuran ini dipandang lebih tepat karena faktor pembatas anggaran itulah yang sebenarnya menentukan pola konsumsi sebuah rumah tangga. Alternatif ukuran keanekaragaman lain seperti jumlah jenis makanan yang dikonsumsi keluarga dinilai kurang tepat karena: **pertama**, penentuan jenis dan jumlah itu sendiri tidak memiliki dasar teori yang kuat; dengan kata lain menggunakan pangsa pengeluaran sebagai ukuran keanekaragaman adalah sesuai dengan teori permintaan. **Kedua**, makna ekonomi dari hasil analisis keanekaragaman yang didasarkan atas jumlah jenis juga relatif kurang sesuai dengan kebutuhan untuk pengambil kebijaksanaan.

Permintaan Konsumen terhadap Keanekaragaman

Disamping harga, pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan perilaku rumah tangga dalam konsumsi pangan. Hukum Engel memperlihatkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah akan mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk membeli kebutuhan pokok. Sebaliknya, rumah tangga yang berpendapatan tinggi hanya akan membelanjakan sebagian kecil saja dari total pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Dalam kelompok pangan, kita juga mengenal beberapa komoditas yang dapat dikelompokkan kedalam pangan pokok seperti beras dan pangan mewah seperti daging. Peningkatan pendapatan akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap pangan pokok dan akan meningkatkan permintaan terhadap pangan mewah. Hal ini menunjukkan adanya realokasi dari suatu pemusatan belanja konsumen ke bentuk pembelanjaan yang lebih menyebar sesuai dengan peningkatan pendapatan. Salah satu cara untuk mengukur perubahan penyebaran ini adalah dengan menggunakan indeks **entropy** dari pangsa pengeluaran (Theil dan Clements, 1987), yaitu:

$$H = - \sum_{i=1}^n w_i \ln w_i \dots\dots\dots (3)$$

Nilai H berkisar dari 0 sampai dengan $\ln n$, dimana n adalah jumlah jenis komoditas. Dengan demikian nilai maksimum H dalam tulisan ini adalah $\ln 12 = 2.4849$.

Dalam tulisan ini kita ingin menerangkan H. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi keputusan konsumsi pangan sebuah rumah tangga, pendapatan dapat dikatakan sebagai faktor utama. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang, kesempatan yang tersedia bagi orang tersebut meningkat, termasuk kesempatan untuk membeli beranekaragam jenis makanan. Sejalan dengan hal tersebut,

Shonkwiler, Lee dan Taylor (1987) menemukan bahwa keanekaragaman konsumsi pangan adalah barang mewah yang tidak sensitif terhadap perubahan harga. Selanjutnya, Theil dan Finke (1983), Jackson (1984) dan Lee dan Brown (1989) juga menemukan bahwa pendapatan merupakan faktor penentu dalam permintaan terhadap keanekaragaman pangan. Dengan demikian, selain alasan ketersediaan data dan alasan teoritis, membatasi diri pada pendapatan sebagai peubah utama yang dihipotesiskan dapat menerangkan permintaan terhadap keanekaragaman konsumsi pangan juga ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu. Hubungan antara keanekaragaman konsumsi dengan pengeluaran dinyatakan dalam bentuk:

$$H = a + b \log M + e \dots\dots\dots (4)$$

dimana H dan M seperti telah didefinisikan pada bagian terdahulu, a dan b adalah parameter fungsi permintaan terhadap keanekaragaman, dan e adalah galat acak. Teknik pendugaan OLS digunakan untuk menduga a dan b.

Data dan Sumberdaya Data

Dalam tulisan ini pendapatan rumah tangga didekati oleh pengeluaran rumah tangga. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari publikasi Biro Pusat Statistik: Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi 1987, Survei Sosial Ekonomi 1987. Data yang dianalisis terbatas pada data konsumsi rumah tangga kota di Indonesia. Sesuai dengan data yang tersedia, satuan analisis dalam tulisan ini adalah provinsi. Dengan demikian jumlah contoh dalam analisis adalah 27 provinsi.

PERUBAHAN DALAM PENGELUARAN

Pembandingan data pangsa pengeluaran pangan rumah tangga kota pada tahun 1981, 1984 dan tahun 1987 menurut jenis pangan menunjukkan bahwa (Lampiran 1) : (1) secara nasional pangsa pengeluaran rumah tangga kota untuk padi-padian telah menurun sebanyak 5.11 persen, kecuali untuk Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Irian Jaya. (2) Peningkatan pangsa pengeluaran yang besar terjadi pada makanan jadi, yaitu sebesar 6.63 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya peranan industri makanan jadi dalam pola konsumsi rumah tangga di Indonesia. (3) Pangsa pengeluaran konsumsi telur dan susu telah meningkat sebesar 2.18 persen, tetapi pangsa pengeluaran ikan telah berkurang sebesar kurang lebih 2 persen. Hal terakhir ini dimungkinkan oleh besarnya proporsi konsumsi ikan asin dalam kelompok ikan. Apabila sebagian besar ikan asin tersebut adalah ikan asin berkualitas rendah, maka peningkatan pendapatan akan menurunkan konsumsi ikan asin tersebut. (4) Perubahan konsumsi bahan pangan

lainnya relatif kecil. Informasi yang paling penting dari hasil diatas adalah adanya kecenderungan konsumsi pangan yang lebih beranekaragam yaitu proporsi anggaran yang dibelanjakan untuk beras berkurang dan terjadi peningkatan konsumsi pada jenis pangan lainnya khususnya daging, telur dan susu, buah-buahan, dan makanan jadi.

ENTROPY SEBAGAI UKURAN KEANEKARAGAMAN

Tabel 1 memperlihatkan nilai entropy dan total pengeluaran pangan yang menunjukkan indeks keanekaragaman konsumsi rumah tangga kota pada tahun

Tabel 1. Nilai indeks entropy pengeluaran pangan dan pengeluaran rata-rata per kapita per bulan untuk sub golongan makanan rumah tangga kota menurut provinsi, tahun 1981, 1984 dan 1987

No.	Provinsi	1981		1987	
		H	M	H	M
1.	DI. Aceh	2,0514	9.986	2,1817	20.671
2.	Sumatra Utara	2,0928	9.061	2,1674	18.620
3.	Sumatra Barat	2,1754	11.125	2,1893	21.113
4.	Riau	2,0871	11.315	2,2412	20.956
5.	Jambi	2,1162	10.611	2,2674	18.435
6.	Sumatra Selatan	2,1465	9.530	2,2421	18.684
7.	Bengkulu	2,0991	9.731	2,1972	19.420
8.	Lampung	2,0313	8.035	2,2065	16.657
9.	DKI Jakarta	2,2049	10.396	2,2371	22.187
10.	Jawa Barat	2,1454	8.550	2,2283	16.610
11.	Jawa Tengah	2,0969	7.238	2,1927	14.125
12.	DI. Yogyakarta	2,1463	8.326	2,1565	14.173
13.	Jawa Timur	2,1538	7.871	2,2143	15.667
14.	B a l i	2,0548	7.476	2,1634	16.425
15.	Nusa Tenggara Barat	2,0325	6.635	2,1209	12.703
16.	Nusa Tenggara Timur	2,0306	8.477	2,1852	16.829
17.	Kalimantan Barat	2,1185	9.816	2,2349	19.813
18.	Kalimantan Tengah	2,1291	12.881	2,2045	21.724
19.	Kalimantan Selatan	2,0818	10.843	2,1221	21.561
20.	Kalimantan Timur	2,1417	12.271	2,2824	22.585
21.	Sulawesi Utara	2,0877	11.012	2,1993	17.017
22.	Sulawesi Tengah	2,0862	10.080	2,2224	17.257
23.	Sulawesi Selatan	2,0172	8.025	2,1347	14.454
24.	Sulawesi Tenggara	2,0546	8.347	2,1129	15.125
25.	Maluku	2,1674	11.543	2,2848	19.484
26.	Irian Jaya	2,2417	12.958	2,2973	21.527
Indonesia		2,1634	8.890	2,2371	17.494

Keterangan: H = Indeks entropy; M = Pengeluaran pangan (Rp).

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).

1981 dan 1987 menurut propinsi di Indonesia. Seperti telah dikemukakan, nilai maksimum indeks entropy dalam tulisan ini adalah 2.4849. Untuk kasus agregat Indonesia, nilai indeks entropy pada tahun 1981 adalah 2,1634. Nilai indeks ini meningkat menjadi 2.2371 pada tahun 1987. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan rumah tangga kota di Indonesia telah berkembang kearah yang lebih beranekaragam. Perubahan pola konsumsi diatas juga konsisten dengan perubahan pola konsumsi yang terjadi di kota-kota propinsi di Indonesia. Seperti akan diuraikan pada bagian berikut, hal tersebut terjadi antara lain sebagai dampak positif dari peningkatan pendapatan.

HUBUNGAN KEANEKARAGAMAN KONSUMSI DENGAN PENDAPATAN

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pendapatan rumah tangga didekati dengan pengeluaran rumah tangga yang dalam hal ini adalah pengeluaran pangan rumah tangga. Sedangkan keanekaragaman konsumsi pangan rumah tangga didekati dengan indeks entropy (H). Semakin besar nilai H, berarti semakin beranekaragam konsumsi pangan suatu rumah tangga. Dari hasil analisis yang dilakukan, ternyata ada hubungan positif antara pendapatan dengan keanekaragaman konsumsi pangan rumah tangga kota di Indonesia.

Semakin tinggi pendapatan, nilai indeks entropy semakin besar, berarti lebih beranekaragam jenis pangan yang dikonsumsi. Keadaan ini terjadi baik pada tahun 1981 maupun 1987. Hubungan antara keanekaragaman konsumsi pangan dengan pendapatan untuk tahun 1981 dan 1987 dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$H_{1981} = 1,7136 + 0,1745 \log M_{1981} \dots\dots\dots(5)$$

$$(0,1196) (0,0528)$$

$$R^2 = 0,31$$

$$H_{1987} = 1,7051 + 0,1724 \log M_{1987} \dots\dots\dots(6)$$

$$(0,1554) (0,0536)$$

$$R^2 = 0,30$$

Keterangan: Angka dalam kurung adalah nilai standar deviasi.

Dari kedua persamaan regresi diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan permintaan terhadap keanekaragaman konsumsi pangan rumah tangga kota di Indonesia. Keragaman dalam keanekaragaman konsumsi pangan yang mampu diterangkan oleh pendapatan adalah sekitar 30 persen. Sedangkan sisanya, kurang lebih 70 persen keragaman dalam keanekaragaman konsumsi pangan diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam analisis ini.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berikut:

Pola konsumsi pangan masyarakat perkotaan di Indonesia, walaupun masih menunjukkan bahwa konsumsi beras masih cukup tinggi, telah menunjukkan adanya kecenderungan kearah konsumsi pangan yang lebih beranekaragam. Hal ini telah diperlihatkan baik oleh perubahan dalam pangsa pengeluaran maupun oleh nilai indeks entropy. Salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong perubahan pola konsumsi tersebut adalah peningkatan pendapatan.

Implikasi penting dari hasil analisis diatas adalah bahwa perubahan pola konsumsi pangan kearah yang lebih beraneka ragam juga akan menunjang dicapainya kelestarian swasembada beras. Artinya, peningkatan pendapatan akan disertai peningkatan pengeluaran untuk komoditas non beras sehingga permintaan efektif terhadap beras akan berkurang.

Implikasi lain yang penting untuk diperhatikan adalah produksi komoditas pangan non beras terutama pangan hasil olahan perlu ditumbuh-kembangkan. Artinya sistem produksi komoditas non beras dan agro industri perlu dikembangkan untuk mengantisipasi arah perubahan pola permintaan pangan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharsjah J.S. *et al.* 1988. Diversifikasi Sebagai Peluang untuk Memanfaatkan Swasembada Pangan. Makalah disajikan pada Diskusi Panel "Memantapkan Swasembada Pangan", PERAGI Komisariat Bogor, 11 Oktober 1988.
- Biro Pusat Statistik, 1987. Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi, 1987 (Survei Sosial Ekonomi Nasional 1987). Jakarta.
- Darmawan, D.H.A. and Faisal Kasryno, 1988. Prospect of Supply and Demand for Food in Indonesia. Nutrition Circle Meeting, Jakarta, 15 January 1988.
- FAO Regional Office for Asia and The Pacific, 1989. Towards Nutritional Adequacy in Asia-Pacific Region. Expert Consultation of The Asia Network for Food and Nutrition on Nutrition and Urbanization. Bangkok, Thailand, 2-5 May 1989.
- Jackson, L.F. 1984. "Hierarchic Demand and the Engel Curve for Variety". Review of Economics and Statistics. 66: 8-15.
- Lee, J. 1987. "The Demand for a Varied Diet With Econometric Models for Count Data", Amer. J. Agric.Econ., 69 (1987):687-92.
- , dan Brown. 1989. "Consumer Demand for Food Diversity", Southern Journal of Agricultural Economics, Vol.21, No.2., December 1989. 47-53
- LIPI, Persagi dan Pergizi Pangan, 1988. Kesimpulan dan Rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi IV. Jakarta, 1-3 Juni 1988.
- Pakpahan, A. 1988a. Refleksi Diversifikasi dalam Teori Ekonomi. Makalah disampaikan pada Kongres Perhepi, 12-16 Januari 1988, Jakarta.

- , dan F. Kasryno. 1988b. Diversifikasi Pertanian dalam Kaitan Intersektoral. Makalah disampaikan pada Kongres Perhepi, 12-16 Januari 1988, Jakarta.
- , *et.al.* 1990. Agricultural Diversification in Indonesia. Monograph Series No.1, Center for Agro Economic Research, Bogor.
- , dan E. Pasandaran. 1990. Keamanan Pangan dan Peluangnya. Prisma No.2; 60-74.
- Shonkwiler, J.S. *et al.* 1987. "An Empirical Model of the Demand for a Varied Diet". *Applied Econ.* 19(1987):1403-10.
- Theil, H. dan R. Finke. 1983. "The Consumer's Demand for Diversity". *Eur. Econ. Rev.* 23(1983): 348-59.

Tabel Lampiran 1. Persentase pengeluaran jenis pangan padi-padian dan umbi-umbian rumah tangga kota berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 1981, 1984 dan 1987

No. Provinsi	Cereals/padi-padian			Tubers/umbi-umbian		
	1981	1984	1987	1981	1984	1987
1. DI. Aceh	26,52	18,88	22,38	0,91	1,31	1,07
2. Sumatra Utara	27,39	23,46	23,35	0,76	1,08	1,04
3. Sumatra Barat	25,28	22,20	23,93	1,21	1,26	1,39
4. Riau	23,76	21,90	20,06	1,21	1,58	1,45
5. Jambi	22,58	21,96	19,56	1,26	1,48	1,66
6. Sumatra Selatan	25,46	22,05	20,77	1,14	1,33	1,33
7. Bengkulu	28,52	27,47	24,42	1,23	1,67	0,78
8. Lampung	31,33	28,55	25,18	0,71	1,20	0,94
9. DKI Jakarta	23,09	18,46	16,63	0,83	1,00	0,99
10. Jawa Barat	28,58	24,15	23,14	0,89	1,30	1,24
11. Jawa Tengah	29,69	23,76	24,20	0,91	1,36	1,21
12. DI. Yogyakarta	23,22	19,17	22,06	0,89	0,83	0,83
13. Jawa Timur	26,29	22,62	20,33	0,90	1,28	0,96
14. B a l i	32,68	27,24	24,76	0,44	1,00	0,72
15. Nusa Tenggara Barat	35,09	35,57	30,99	0,45	0,54	0,60
16. Nusa Tenggara Timur	32,43	27,56	26,84	0,98	1,36	1,43
17. Kalimantan Barat	25,12	21,59	20,43	0,94	1,43	0,92
18. Kalimantan Tengah	20,46	18,10	20,91	0,73	0,91	0,90
19. Kalimantan Selatan	24,18	21,04	19,22	0,54	0,81	0,63
20. Kalimantan Timur	20,27	15,74	16,94	1,08	1,85	1,40
21. Sulawesi Utara	27,46	23,41	24,18	1,24	2,11	1,39
22. Sulawesi Tengah	26,61	22,91	20,91	1,11	1,63	1,26
23. Sulawesi Selatan	28,04	24,59	23,85	1,10	0,81	1,02
24. Sulawesi Tenggara	27,18	26,08	27,38	0,92	1,42	0,95
25. Maluku	20,57	20,13	16,92	1,92	4,24	3,50
26. Irian Jaya	18,98	15,96	19,06	2,96	2,52	3,97
Indonesia	26,28	22,06	21,17	0,91	1,23	1,14

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).

Tabel Lampiran 1. (lanjutan)

No. Provinsi	Ikan			Daging			Telur dan susu		
	1981	1984	1987	1981	1984	1987	1981	1984	1987
1. DI. Aceh	19,76	14,19	15,55	6,61	5,48	6,05	3,04	5,32	5,54
2. Sumatra Utara	15,73	14,26	15,69	5,05	5,19	4,71	3,08	4,50	5,10
3. Sumatra Barat	10,37	10,14	10,24	8,17	6,91	5,63	5,46	5,42	5,58
4. Riau	17,47	15,74	14,01	6,26	6,24	6,22	3,81	5,09	6,01
5. Jambi	16,61	13,26	11,93	5,68	5,25	5,48	3,34	4,94	6,13
6. Sumatra Selatan	12,82	12,55	12,19	6,21	5,07	5,50	4,32	5,92	7,48
7. Bengkulu	13,38	10,04	10,21	5,84	5,55	7,80	3,61	5,40	6,89
8. Lampung	8,55	6,66	7,31	4,06	3,90	6,68	3,58	5,60	6,39
9. DKI Jakarta	9,37	6,80	7,41	8,47	7,23	8,56	5,02	6,62	6,76
10. Jawa Barat	10,01	7,89	7,12	6,53	7,55	7,67	4,10	5,85	6,38
11. Jawa Tengah	4,75	4,25	3,70	5,31	6,22	7,41	3,77	5,47	6,21
12. DI. Yogyakarta	2,25	2,29	2,19	7,63	6,98	6,86	5,24	6,76	7,64
13. Jawa Timur	7,18	5,27	5,72	8,65	7,05	8,53	4,31	4,80	6,47
14. B a l i	6,37	5,35	5,70	10,29	8,83	11,37	3,72	4,96	5,76
15. Nusa Tenggara Barat	7,39	7,95	7,87	8,98	5,92	7,60	3,44	3,67	3,66
16. Nusa Tenggara Timur	9,50	8,22	9,45	11,42	11,18	10,78	2,68	6,52	6,19
17. Kalimantan Barat	15,50	14,56	13,25	6,29	9,01	7,31	4,21	6,73	6,77
18. Kalimantan Tengah	20,81	17,91	16,57	5,57	5,90	6,84	4,25	6,65	7,45
19. Kalimantan Selatan	20,13	17,43	19,69	5,50	4,24	3,38	4,44	4,48	4,63
20. Kalimantan Timur	19,29	10,67	12,71	6,39	7,83	6,03	4,68	8,25	7,19
21. Sulawesi Utara	15,74	13,29	13,13	4,69	5,96	6,11	3,03	5,43	6,63
22. Sulawesi Tengah	17,38	14,72	15,92	6,69	5,23	6,98	3,09	6,46	6,26
23. Sulawesi Selatan	21,92	17,97	18,59	3,68	3,39	2,62	3,17	5,66	6,66
24. Sulawesi Tenggara	17,91	14,18	14,79	6,15	6,36	3,79	3,88	5,77	6,45
25. Maluku	14,75	11,58	12,34	3,64	4,48	3,67	3,04	6,22	7,65
26. Irian Jaya	7,49	10,39	12,30	5,67	8,04	5,25	4,88	7,45	7,44
Indonesia	10,43	8,52	8,44	6,98	6,64	7,32	4,21	5,76	6,39

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).

Tabel Lampiran 1. (lanjutan)

No. Provinsi	Sayur-sayuran			Kacang-kacangan			Buah-buahan		
	1981	1984	1987	1981	1984	1987	1981	1984	1987
1. DI. Aceh	11,48	8,78	8,01	1,57	2,56	2,47	4,46	3,93	5,69
2. Sumatra Utara	12,17	10,59	9,03	1,99	1,93	2,08	4,08	3,15	5,86
3. Sumatra Barat	12,05	10,97	9,24	2,29	2,14	2,15	4,38	3,59	6,39
4. Riau	12,15	10,45	10,76	2,04	2,11	2,44	4,27	3,66	5,97
5. Jambi	14,32	12,75	10,70	3,60	2,72	3,61	3,62	4,32	8,83
6. Sumatra Selatan	11,86	9,35	9,37	3,17	2,43	2,87	5,25	5,11	7,03
7. Bengkulu	11,73	9,66	10,39	2,30	1,96	2,53	3,28	3,13	5,42
8. Lampung	12,03	10,85	9,92	3,75	3,67	3,99	3,52	5,21	5,82
9. DKI Jakarta	10,47	8,16	8,67	4,27	3,49	3,59	4,65	5,12	5,38
10. Jawa Barat	8,05	8,17	7,41	5,50	4,66	5,38	4,02	5,48	6,03
11. Jawa Tengah	9,01	9,88	9,08	6,97	5,99	6,17	4,38	4,89	4,84
12. DI. Yogyakarta	8,50	7,46	8,21	7,16	5,06	5,64	4,84	5,12	5,73
13. Jawa Timur	8,01	8,11	7,62	6,54	6,15	6,04	4,57	4,83	4,72
14. B a l i	9,59	8,74	7,86	3,73	3,45	4,61	4,61	4,80	4,58
15. Nusa Tenggara Barat	7,94	7,98	7,02	4,39	3,37	4,51	4,39	3,99	5,31
16. Nusa Tenggara Timur	10,83	9,18	9,45	1,49	2,68	3,14	3,79	4,12	4,28
17. Kalimantan Barat	10,09	8,16	6,57	3,13	3,10	2,43	3,72	4,35	8,26
18. Kalimantan Tengah	10,78	9,02	7,82	2,42	2,85	1,99	5,05	5,64	9,22
19. Kalimantan Selatan	7,96	6,78	6,75	1,80	1,64	1,27	3,95	5,75	8,33
20. Kalimantan Timur	11,21	9,49	9,88	2,91	3,00	3,68	4,34	3,42	8,64
21. Sulawesi Utara	11,74	7,35	7,35	1,02	2,25	2,35	4,15	4,13	4,65
22. Sulawesi Tengah	10,44	8,72	7,69	1,20	2,37	2,56	4,09	4,65	7,26
23. Sulawesi Selatan	7,60	6,35	7,40	1,42	1,90	2,24	3,95	3,77	5,44
24. Sulawesi Tenggara	8,57	7,30	7,00	0,96	2,07	1,66	4,37	4,58	6,16
25. Maluku	12,90	10,94	10,13	1,52	2,77	2,99	4,69	3,11	5,51
26. Irian Jaya	15,20	9,82	10,44	2,70	3,21	3,57	4,78	4,95	6,23
Indonesia	9,70	8,71	8,39	4,56	4,01	4,37	4,38	4,78	5,65

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).

Tabel Lampiran 1. (lanjutan)

No. Provinsi	Konsumsi lainnya			Makanan jadi		
	1981	1984	1987	1981	1984	1987
1. DI. Aceh	15,49	13,35	14,74	3,69	18,70	10,99
2. Sumatra Utara	13,91	13,78	11,13	6,82	12,87	13,74
3. Sumatra Barat	12,72	11,26	10,72	10,85	17,68	15,64
4. Riau	17,01	15,31	14,69	4,06	9,25	8,66
5. Jambi	16,38	15,66	14,33	3,09	8,53	8,71
6. Sumatra Selatan	15,59	15,49	14,68	4,75	10,94	9,41
7. Bengkulu	14,37	15,05	13,06	6,30	8,75	9,17
8. Lampung	16,20	15,39	13,26	3,57	7,95	9,35
9. DKI Jakarta	14,92	13,29	13,34	10,11	19,67	19,14
10. Jawa Barat	14,07	13,97	12,90	9,98	12,83	14,48
11. Jawa Tengah	18,43	16,26	15,13	8,72	14,15	14,09
12. DI. Yogyakarta	18,47	15,58	15,44	14,72	25,28	18,79
13. Jawa Timur	18,68	16,47	15,75	7,09	14,68	16,59
14. B a l i	15,14	14,36	14,82	8,84	16,11	14,81
15. Nusa Tenggara Barat	14,62	14,11	12,80	4,79	9,67	11,07
16. Nusa Tenggara Timur	15,11	16,41	15,42	3,16	4,49	5,77
17. Kalimantan Barat	17,24	16,33	13,10	4,59	5,61	11,73
18. Kalimantan Tengah	15,20	15,83	13,34	5,54	9,49	7,72
19. Kalimantan Selatan	16,07	14,42	14,02	6,94	15,26	14,55
20. Kalimantan Timur	17,06	17,49	13,74	4,49	12,16	10,51
21. Sulawesi Utara	14,67	13,81	14,49	7,60	11,70	10,75
22. Sulawesi Tengah	17,66	19,01	15,23	3,27	6,16	7,63
23. Sulawesi Selatan	16,00	16,30	15,09	4,30	8,84	8,36
24. Sulawesi Tenggara	17,00	15,60	16,10	4,16	7,96	7,86
25. Maluku	16,23	17,26	14,76	9,64	10,36	14,08
26. Irian Jaya	12,96	14,46	15,07	15,97	14,78	8,72
Indonesia	15,97	14,77	13,91	8,14	14,58	14,77

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).

Tabel Lampiran 1. (lanjutan)

No. Provinsi	Minuman berakohol			Tembakau/sirih		
	1981	1984	1987	1981	1984	1987
1. DI. Aceh	0,03	0,25	0,05	6,93	7,24	7,44
2. Sumatra Utara	0,29	0,51	0,14	8,73	8,67	8,11
3. Sumatra Barat	0,08	0,36	0,10	7,14	8,07	8,98
4. Riau	0,01	0,86	0,56	7,05	7,81	9,17
5. Jambi	0,09	0,21	0,21	9,40	8,92	8,84
6. Sumatra Selatan	0,02	0,28	0,24	9,41	9,48	9,18
7. Bengkulu	0,12	0,34	0,11	9,31	10,98	9,24
8. Lampung	0,02	0,07	0,20	12,67	10,96	10,97
9. DKI Jakarta	0,04	0,18	0,19	8,76	9,99	9,38
10. Jawa Barat	0,03	0,13	0,10	8,26	8,04	8,14
11. Jawa Tengah	0,07	0,32	0,19	7,89	7,43	7,77
12. DI. Yogyakarta	0,04	0,07	0,09	7,05	5,37	6,59
13. Jawa Timur	0,04	0,25	0,11	7,74	8,47	7,15
14. B a l i	0,08	0,42	0,20	4,44	4,93	4,82
15. Nusa Tenggara Barat	0,06	0,32	0,24	8,47	6,91	8,32
16. Nusa Tenggara Timur	0,47	1,61	0,94	8,15	6,68	6,23
17. Kalimantan Barat	0,09	0,49	0,31	9,10	8,64	8,90
18. Kalimantan Tengah	—	0,10	0,13	9,18	7,60	7,11
19. Kalimantan Selatan	0	0,02	—	8,50	7,78	7,62
20. Kalimantan Timur	0,01	0,46	0,18	8,29	9,64	9,12
21. Sulawesi Utara	0,47	2,01	0,55	8,19	8,55	8,42
22. Sulawesi Tengah	0,10	0,26	0,44	8,37	7,89	7,86
23. Sulawesi Selatan	0,41	1,69	0,38	8,70	8,75	8,35
24. Sulawesi Tenggara	0,22	1,07	0,24	8,73	7,61	7,62
25. Maluku	0,53	0,92	0,82	10,56	7,98	7,63
26. Irian Jaya	0,65	1,34	0,42	7,75	7,09	7,52
Indonesia	0,08	0,34	0,18	8,36	8,61	8,28

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1987 (diolah).